

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Atmosudirjo, Prayudi, 1988, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2016, *Modul : Tugas, Kewenangan, dan Administrasi Bidang Perdata dan TUN (Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Tahun 2016)*, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 1989, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia.
- Effendi, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 2010, *Kejaksaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Timpani Publishing,
- Ekawati, Evy Lusia, 2013, *Peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Perdata*, Yogyakarta : Genta Press.
- Gofar, Abdul, Lasmaida Limbong dan Tatik Sunatri, 2014, *Peningkatan Profesionalitas Jaksa Pengacara Negara dalam Melaksanakan Kewenangan Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*, Jakarta : MISWAR anggota IKAPI.
- Indroharto, 1999, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Rajawali Press.
- Jusuf, Muhammad, 2014, *Hukum Kejaksaan : Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Surabaya : Laksbang Justitia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama, Edisi III, Jakarta : Balai Pustaka.
- Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 31 Mei 2017, *Berkas Perkara Perdata Non Litigasi SKK No. SKK/13/042017 Jo.*

*No. 04/Gs.2/04/2017 antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Yogyakarta Melawan TK ABA Kadipaten Kulon, Yogyakarta.*

Kejaksaan Negeri Yogyakarta, 2019, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tahun 2019*, Kejaksaan
Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam
Pembangunan*, Bandung : Alumni.

Marbun, SF., 1977, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi
di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung :
PT. Citra Aditya Bakti.

Prakoso, Djoko, 1985, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*,
Jakarta : Ghalia Indonesia.

R. Tresna, 1978, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta : Pradnya
Paramita.

Simons, Herbert A., 1984, *Perilaku Administrasi (Terjemahan)*, Jakarta : PT.
Bina Aksara.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

_____, 1986, *Pengantar Dasar-Dasar Penelitian Ilmu-Ilmu
Sosial*, Jakarta : Rajawali Press.

_____, 2018, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum*, Depok : Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, 1995, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*,
Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soemardjono, Maria Sri Wulani, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan
Penelitian (Sebuah Panduan Dasar)*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
Utama.

Sumanjaya, 2002, *Kejaksaan RI dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta : Majalah
Hukum Kejaksaan RI.

Wahyudi, Bambang Setyo, 2017, *Indonesia Mencegah : Upaya Pencegahan
Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN*, Jakarta : Bhuana
Ilmu Populer.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65).

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ;

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ;

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;

Peraturan Jaksa Agung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi, dan
Wewenang Kejaksaan dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara.

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

C. Karya Ilmiah

Murniati, Sri, 2017, *Kewenangan Jaksa Pengacara Negara sebagai Wakil Pemerintah dalam Bidang Perdata secara Non Litigasi pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Permana Putra, Aditya, 2014, *Kewenangan Kejaksaan dalam Menangani Perkara Perdata (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)*, Skripsi/Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tedhalosa, Adhing, 2018, *Penyelesaian Kewajiban Pendaftaran Program Jaminan Sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Magelang oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Widayati, Astuti, 2017, *Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Mewakili Badan Usaha Milik Negara dalam Penanganan Perkara Perdata secara Litigasi (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor : 43/Pdt.G/2012/PN.Btl) Di Pengadilan Negeri Bantul*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Internet

Abdul Hamied Razaq, "BPJS Ketenagakerjaan Kerjasama dengan Kejaksaan Salah Satunya untuk Tagih Iuran", <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/04/18/510/986273/-bpjs-ketenagakerjaan-kerjasama-dengan-kejaksaan-salah-satunya-untuk-tagih-iuran>, diakses pada tanggal 28 Mei 2019.

BPJS Ketenagakerjaan, “Sejarah BPJS Ketenagakerjaan”,
<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/sejarah.html>, diakses pada
tanggal 29 Mei 2019.

BPJS Ketenagakerjaan, “Tentang Kami”,
<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>, diakses
pada tanggal 29 Mei 2019.

Kejaksaan Republik Indonesia, “Pengertian Kejaksaan”,
https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diakses
pada tanggal 01 Juli 2020.